BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

Dalam pembahasan mengenai pemberdayaan ini, akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Diantara pembahasan tersebut yakni:

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari “daya” yang mempunyai arti kekuatan atau kemampuan.¹⁵ Oleh karenanya pemberdayaan juga dapat dimaknai sebagai proses untuk berdaya, ataupun proses guna memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, ataupun proses memberikan daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya/kekuatan/kemampuan kepada pihak yang kurang atau bahkan belum mempunyai daya/kekuatan/kemampuan.¹⁶ Kata proses pada definisi diatas merujuk pada serangkaian langkah ataupun tindakan yang dilakukan secara bertahap sebagai upaya mengubah masyarakat dari tahapan yang kurang atau bahkan belum berdaya menuju tahapan keberdayaan. Proses inilah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2005), hal. 118.

¹⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hal. 77.

yang lemah, baik dalam hal *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* menuju pada penguasaan dalam bidang tertentu.

Sedangkan makna memperoleh dalam definisi diatas menunjukkan bahwa sumber untuk kondisi berdaya itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Maka, masyarakatlah yang seharusnya mencari, mengusahakan, melakukan, bahkan menciptakan kondisi untuk berdaya dengan cara meminta kepada pihak lain yang mempunyai daya/kekuatan/kemampuan untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Kondisi seperti ini akan tercapai apabila masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan mereka, dan untuk selanjutnya berusaha memperoleh daya/kemampuan/kekuatan tersebut.¹⁷

Pemberdayaan merupakan upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya (*enabling*) potensi dalam masyarakat. Menurut Winarni yang dikutip oleh Ardito Bhinadi pemberdayaan meliputi tiga hal yang meliputi pengembangan (*enabling*), memperkuat adanya potensi atau daya (*empowering*), serta terciptanya sikap kemandirian. Logika berpikir tersebut berasal dari adanya asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki daya, akan tetapi terkadang mereka tidak menyadari adanya daya tersebut, dan cenderung bersikap acuh. Jika asumsi yang demikian berkembang, maka pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya yang dimiliki oleh tiap individu, dengan

¹⁷ *Ibid.*

cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki serta berusaha mengembangkannya.¹⁸

Menurut Kartasasmita yang dikutip oleh Anwar, pemberdayaan adalah kemampuan individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, upaya tersebut berguna untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu. Dalam hal memperkuat unsur keberdayaan dan meningkatkan harkat dan martabat, dilakukan dengan mengandalkan kekuatan individu maupun kelompok itu sendiri sehingga mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses menuju kemandirian dalam bermasyarakat.¹⁹

Pemberdayaan mengandung konsep partisipatif, yaitu bagaimana masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pembangunan sehingga terpenuhi hak mereka dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Pemberdayaan sendiri mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki. Menurut Suparjan dan Hempri sebagaimana dikutip oleh Ardito Bhinadi, secara garis besar, pemberdayaan melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya sebagai obyek menjadi subyek.²⁰

¹⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 24.

¹⁹ Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1.

²⁰ Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan*, hal. 25.

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai sebuah proses dan tujuan yang saling berkait. Dimana dalam proses tersebut memuat serangkaian kegiatan memperkuat benteng pertahanan diri dari tiap-tiap individu. Sedangkan tujuannya merujuk pada kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.²¹

Menurut Edi Suharto sebagaimana dikutip oleh Iffatus Sholehah, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah masyarakat, termasuk individu yang dalam belunggu kemiskinan. Pemberdayaan sendiri menunjukkan keadaan atau hasil yang hendak dicapai oleh perubahan sosial, bahwa masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat di muka umum, memiliki mata pencaharian sendiri, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mampu bersikap mandiri dalam menjalankan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari.²²

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan taau kemampuan dalam:

²¹ Iffatus Sholehah, "Pemberdayaan Difabel Melalui *Asset Based Approach*: Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)" *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 1, (2017), hal. 184.

²² *Ibid.*

- a. Memenuhi kebutuhan primernya, sehingga mereka bebas dari kelaparan, kesakitan, maupun dari kebodohan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif guna meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk membangun keberdayaan dalam masyarakat, guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Maka, guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya serangkaian kegiatan pengembangan. Kegiatan tersebut berfungsi membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup dalam berdaya dan mandiri di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga, masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari seri ekonomi maupun sosial seperti tumbuh rasa percaya diri, mampu mengemukakan pendapat dimuka umum, serta mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Agus Ahmad yang dikutip oleh Dauatus Saidah tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat atau membangun kemampuan mereka guna memajukan mereka ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan. Masyarakat sendiri diberdayakan

²³ Suharto, *Membangun Masyarakat....*, hal. 58.

untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka. Untuk itu, upaya pemberdayaan harus diarahkan guna peningkatan martabat manusia menjadi masyarakat maju dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴

Menurut Edi Suharto sebagaimana dikutip oleh Oca Pawalin, tujuan utama dari pemberdayaan sendiri adalah meningkatkan kemandirian masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Menurut Suhartini, yang dikutip oleh Oca Pawalin pemberdayaan dalam hal ini ditujukan bagi orang-orang lemah yang cenderung kurang beruntung seperti penyandang disabilitas. Tujuan lain dari pemberdayaan sendiri yakni menumbuhkan inisiatif, kreativitas serta kemandirian dalam melaksanakan kegiatan yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan pendapatan yang diperoleh dengan peningkatan kemampuan usaha.²⁵

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto Adi sebagaimana dikutip oleh Oca Pawalin, tujuan pemberdayaan di masing-masing bidang berbeda, yakni sebagai berikut:

²⁴ Dauatus Saidah, *Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Keterampilan Handicraft: Tuna Rungu di Yayasan Rumah Regis Tanjung Barat Jakarta Selatan*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 28.

²⁵ Oca Pawalin, *Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 29-30.

- a. Dalam bidang ekonomi, pemberdayaan bertujuan agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, memasarkan produk usahanya, serta mampu membentuk siklus pemasaran yang stabil.
- b. Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan bertujuan agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang dimilikinya serta memanfaatkannya dengan baik.
- c. Dalam bidang sosial, pemberdayaan bertujuan agar kelompok sasaran mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali, seperti mampu mengemukakan pendapat di muka umum ataupun mempunyai mata pencaharian sendiri.²⁶

Selain tujuan pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas, pemberdayaan bidang politik juga diperlukan. Pemberdayaan bidang politik sendiri merupakan pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan dan penguatan kedudukan daya tawar masyarakat menjadi semakin tinggi dihadapan pihak-pihak yang ada dalam bidang politik. Peningkatan dan penguatan daya tawar inilah yang bertujuan agar posisi masyarakat tidak dianggap sebagai pihak sub ordinat oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lainnya. sedangkan pihak-pihak yang terkait dengan program pemberdayaan di bidang politik yakni:

- a. Pemerintah;
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); serta

²⁶ *Ibid.*, hal. 30-31.

- c. Pihak swasta yang mempunyai proyek di daerah tempat tinggal masyarakat.²⁷

Secara garis besar, pemberdayaan bertujuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga diharapkan masyarakat mampu bersikap mandiri. Selain itu, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kemampuan/kekuatan masyarakat itu sendiri.

3. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto sebagaimana dikutip oleh Oca Pawalin, dalam proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan melalui beberapa penerapan pendekatan. Diantara penerapan pendekatan pemberdayaan tersebut, yakni meliputi:

- a. Pemungkinan: Pemberdayaan dapat dicapai dengan cara menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemungkinan inilah yang harus mampu membebaskan sekat kultural dan struktural yang menghambat masyarakat.
- b. Penguatan: Pemberdayaan dapat dicapai dengan cara memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah guna memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri

²⁷ Eko Sudarmanto, dkk., *Konsep Dasar Pengabdian kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, (t.t.: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 151-152.

masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi yang tengah berkembang, sehingga nantinya dengan adanya pemberdayaan maka dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pendapatan yang layak.

- c. Perlindungan: Pemberdayaan dapat dicapai dengan cara melindungi masyarakat khususnya kelompok-kelompok lemah agar tidak adanya perilaku penindasan, serta guna mencegah terjadinya eksploitasi yang dilakukan kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus mampu menghapuskan tindakan diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan kelompok yang lemah.
- d. Penyokongan: Pemberdayaan dapat dicapai dengan cara memberikan bimbingan dan dukungan (*support*) agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya dengan baik. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat guna menghindari kondisi masyarakat yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: Pemberdayaan dapat dicapai dengan cara memelihara kondisi tetap kondusif agar distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok tetap seimbang. Pemberdayaan harus mampu menjamin

keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha yang sama.²⁸

4. Indikator Pemberdayaan

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto sebagaimana dikutip oleh Dauatus Saidah, terdapat delapan indikator dari pemberdayaan. Indikator tersebut mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Delapan indikator tersebut meliputi:

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu ataupun kelompok untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke rumah ibadah, sekolah, pasar, ke rumah tetangga, dan lain-lain. Tingkat mobilitas ini dikatakan tinggi apabila individu tersebut mampu bepergian sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli kebutuhan hidup sehari-harinya/kebutuhan primernya (beras, minyak, gula, bumbu masak, dan lain-lain), serta kebutuhan untuk dirinya (sabun mandi, minyak rambut, bedak, dan lain-lain). Individu dikatakan mampu membeli kebutuhan tersebut, apabila ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, ataupun apa bila ia menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampun individu untuk membeli barang sekunder ataupun tersier (lemari pakaian, meja, kulkas, TV, radio, pakaian keluarga, dan lain-lain). Individu dikatakan

²⁸ Pawalin, *Peran Dinas....*, hal. 31-32.

mampu membeli kebutuhan tersebut, apabila ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, ataupun apa bila ia menggunakan uangnya sendiri.

- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama dengan suami/istri mengenai permasalahan dalam lingkup rumah tangga, seperti renovasi rumah, pembelian hewan ternak, peminjaman modal usaha, dan lain-lain.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan tanpa izin di dimiliki, apakah terdapat seorang yang melarang bekerja di luar rumah, atau apakah melarang mempunyai anak.
- f. Kesadaran hukum dan politik, mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, mengetahui salah satu anggota DPRD setempat, ataupun mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum- hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, seseorang dianggap berdaya apabila ia pernah terlibat dalam kampanye atau melakukan protes bersama orang lain, seperti perihal gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, ataupun protes terhadap penyalahgunaan kekuasaan pegawai pemerintahan.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, seseorang dianggap berdaya apabila ia memiliki aset berupa rumah, tanah, ataupun tabungan secara mandiri atau tanpa paksaan dari pasangan.²⁹

B. Penyandang Disabilitas

Dalam pembahasan mengenai penyandang disabilitas ini, akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Diantara pembahasan tersebut yakni:

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata cacat tidaklah patut dianggap sebagai realita atas keadaan seseorang. Kata ini muncul karena adanya identitas yang diberikan oleh suatu kekuasaan kepada suatu kelompok masyarakat yang berbeda secara fisik dengan anggota masyarakat lainnya. Kata cacat sendiri berarti rusak atau tidak baik, sehingga sangat tidak cocok apabila dijadikan sebagai identitas suatu kelompok masyarakat. Secara empiris sendiri, adanya istilah penyandang cacat menimbulkan sikap atau perlakuan yang tidak baik kepada kelompok orang yang disebut sebagai penyandang cacat tersebut.³⁰

Guna menghindari dan meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka perlu adanya istilah pengganti. Oleh karenanya, pada 2009, Komnas HAM menggelar diskusi pakar guna mengubah

²⁹ Saidah, *Pemberdayaan Masyarakat....*, hal. 30-32.

³⁰ Ari Pratiwi, et. al., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 6.

terminology penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.³¹ Disabilitas yang dalam Bahasa Inggris disebut *disability* yang artinya menunjukkan ketidakmampuan sejak lahir atau cacat yang permanen.³²

Menurut Selwyn Goldsmith sebagaimana dikutip oleh Novita Apriyani, penyandang disabilitas adalah individu yang mempunyai kelainan fisik ataupun mental, sehingga menghambat mereka dalam melakukan suatu aktivitas.³³ Menurut WHO (*World Health Organization*), disabilitas adalah kondisi dimana aktivitas tidak berjalan sesuai batas normal dikarenakan adanya keterbatasan atau kurangnya organ tertentu yang mempengaruhi kemampuan fisik maupun mental seseorang.³⁴ Undang-undang sendiri telah menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan adanya hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan guna ikut berpartisipasi dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³⁵

Menurut Ledia Hanifa sebagaimana dikutip oleh Moh. Nashir Hasan, istilah yang digunakan untuk penyandang disabilitas ini beragam,

³¹ *Ibid.*, hal. 7.

³² Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, laporan penelitian individual, (IAIN Walisongo: 2013), hal. 17.

³³ Novita Apriyani, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 7.

³⁴ Afin Murtie, *Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Maxima, 2016), hal. 88.

³⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

diantaranya seperti individu dengan kebutuhan khusus, special, ataupun difabel.³⁶ Sedangkan menurut Peter Coleridge yang dikutip Moh. Nashir Hasan, penggunaan istilah bagi penyandang disabilitas seperti disebutkan diatas adalah bebas, selama istilah tersebut disukai, dianggap pas, dan tidak menyinggung para penyandang disabilitas, maka istilah-istilah tersebut boleh digunakan. Seperti halnya, kemajemukan dalam berbahasa, suatu kata yang kita anggap sopan ataupun halus, belum tentu demikian bagi orang lain. Contohnya, penyebutan tuna rungu bagi sebagian besar para penyandang disabilitas dengan keterbatasan pendengaran tidak terlalu disukai, hal tersebut dikarenakan mereka menganggap penyebutan tuna rungu hanya sebagai bentuk belas kasih. Sebaliknya, mereka lebih nyaman apabila disebut tuli. Oleh karenanya, setiap orang hendaknya memahami bagaimana cara berbahasa dan bersikap kepada para penyandang disabilitas dengan baik.³⁷

Secara umum, para penyandang disabilitas masih bergantung pada rasa iba dan bantuan dari orang lain. Seringkali para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat non disabilitas. Walaupun mempunyai keterbatasan, kelompok penyandang disabilitas tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain ataupun tak mampu melakukan aktivitas dengan mandiri. Mereka hanya melakukan segala sesuatunya dengan cara berbeda. Kecacatan atau keterbatasan yang

³⁶ Moh. Nashir Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 25.

³⁷ *Ibid.*, hal. 25.

mereka alami bukannya menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Tak jarang, banyak ditemui para penyandang disabilitas yang secara mandiri tetap berkarya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dengan melalui pembelajaran yang tepat dan frekuensi pelatihan yang konsisten terhadap keterampilan mereka, maka penyandang disabilitas mampu berprestasi melebihi orang non disabilitas.³⁸ Maka disimpulkan bahwa para penyandang disabilitas hanya memerlukan pemberdayaan atas potensi-potensi mereka yang sebenarnya ada dalam diri mereka untuk dikembangkan, sehingga mereka hidup sejahtera.

2. Macam Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas memiliki macam yang berbeda-beda terkait dengan kondisi fisik ataupun psikis mereka. Maka, macam-macam penyandang disabilitas meliputi:

a. Tunarungu

Tunarungu adalah kondisi dimana seseorang memiliki hambatan pada pendengaran, baik itu permanen maupun tidak permanen.³⁹ Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang

³⁸ *Ibid.*, hal. 37.

³⁹ *Ibid.*, hal. 27.

berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.⁴⁰ Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya meliputi:

- 1) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40dB);
- 2) Gangguan pendengaran ringan (41-55dB);
- 3) Gangguan pendengaran sedang (56-70dB);
- 4) Gangguan pendengaran berat (71-90dB);
- 5) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90dB);

Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu tak jarang juga mempunyai hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu ini menggunakan bahasa isyarat melalui abjad jari.⁴¹

b. Tunanetra

Menurut Kaufirman & Hallahan yang dikutip Mudjito, et. al. sebagaimana dikutip oleh Moh. Nashir tunanetra merupakan gangguan pada penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun total. Akurasi penglihatan pada tunanetra yakni kurang dari 6/60 atau bahkan sampai pada kondisi tidak memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu lemah penglihatan (*low vision*) dan buta total (*blind*).

⁴⁰ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), hal. 17.

⁴¹ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang....*, hal. 27.

Karena keterbatasan yang dimiliki tunanetra, maka proses pembelajaran mereka lebih menekankan indra yang lain yaitu indra peraba dan indra pendengaran. Oleh karenanya, dalam melakukan pengajaran kepada tunanetra hendaknya menggunakan media yang sifatnya aktual dan bersuara, seperti *tape recorder* ataupun peranti lunak JAWS.

Guna membantu tunanetra dalam beraktivitas di sekolah luar biasa, maka perlunya pembelajaran mengenai orientasi dan mobilitas bagi mereka. Orientasi dan mobilitas yang dimaksud diantaranya mempelajari bagaimana cara tunanetra mengetahui tempat maupun arah serta bagaimana cara menggunakan tongkat putih (tongkat khusus tunanetra dari bahan alumunium).⁴²

c. Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan yang timbul akibat adanya hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam menjalankan fungsi normalnya. Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh oenyakit, kecelakaan, atau merupakan bawaan sejak lahir. Tuna daksa juga sering diartikan sebagai akibat rusaknya tau terganggunya tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal dari suatu individu.⁴³

⁴² *Ibid.*, hal. 26-27.

⁴³ Ahmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi di Yogyakarta*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), hal. 30.

Menurut Argyo Demartoto sebagaimana dikutip oleh Moh. Nashir, yang termasuk kedalam golongan tunadaksa yakni seperti *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak mempunyai hambatan dalam proses belajar. Namun, secara fisik mereka mempunyai hambatan dalam mobilitas.⁴⁴

Tunadaksa sendiri dapat di golongan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tunadaksa taraf ringan, yakni tunadaksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tunadaksa jenis ini umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan oleh kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- 2) Tunadaksa taraf sedang, yakni tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal.
- 3) Tunadaksa taraf berat, yakni tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak dengan kecacatan

⁴⁴ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang....*, hal. 28-29.

ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, atau bahkan idiot.⁴⁵

d. Tunagrahita

Tunagrahita adalah kondisi dimana seseorang memiliki intelektual dibawah rata-rata dan disertai dengan kesulitan dalam beradaptasi. Anak-anak dengan penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi dengan orang lain.

Umumnya, anak-anak dengan penyandang tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama, yakni:

- 1) Fungsi intelektual, yakni kondisi dimana penyandang tunagrahita mengalami kesulitan belajar, khususnya dalam memahami sesuatu dan berkomunikasi.
- 2) Perilaku adaptif, yakni kondisi dimana penyandang tunagrahita mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri.⁴⁶

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi dari tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita dapat golongan menjadi empat golongan, yakni:

⁴⁵ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Aanak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal. 46.

⁴⁶ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang....*, hal. 28.

1) Kategori Ringan (Moron atau Debil)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

2) Kategori Sedang (Imbesil)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

3) Kategori Berat (Severe)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki abnormalitas gisik bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

4) Kategori Sangat Berat (Profound)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang

memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.⁴⁷

e. Tunalaras

Tunalaras adalah kondisi dimana seseorang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau kontrol sosial. Individu dengan penyandang tunalaras biasanya menunjukkan perilaku emosional di sekitarnya. Tunalaras sendiri disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal seperti adanya pengaruh dari lingkungan sekitar.⁴⁸

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 91 menyebutkan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”⁴⁹

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut menjelaskan bahwasanya hak-hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas adalah berupa hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Namun lagi-lagi permasalahan yang kerap kali ditempa para penyandang disabilitas yakni

⁴⁷ Smart, *Anak Cacat....*, hal. 52.

⁴⁸ Hasan *Pemberdayaan Penyandang....*, hal. 29.

⁴⁹ Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

diskriminasi. Pengasingan yang mereka alami membuat para penyandang disabilitas semakin terkucilkan. Diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas sendiri disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap para penyandang disabilitas tidak cukup cakap dalam melakukan aktifitas-aktifitas produksi. Bagi orang lain, penyandang disabilitas tidak memungkinkan untuk terlibat aktif dalam proses produksi. Hal ini dapat dilihat dari prevalensi kelompok penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa mereka umumnya hidup dalam kubangan kemiskinan dan kesulitan ekonomi.

Peran pemerintah atas pemberdayaan bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan guna mengurangi dampak diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Salah satunya dengan pemberdayaan di bidang ekonomi yang mana hal ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini terutama dikarenakan pemberdayaan di bidang ekonomi adalah salah satu isu penting dalam kajian mengenai disabilitas. Dalam hal partisipasi pada aktifitas ekonomi, penyandang disabilitas kerap mengalami hambatan yang menjadikan mereka terkucilkan dari arus utama perekonomian dan cenderung hanya terlibat dalam aktifitas-aktifitas pseudo-ekonomi.

Pengoptimalan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, dapat dilakukan melalui peran pemerintah dalam menjangkau potensi para penyandang disabilitas, dengan cara mempromosikan *self-sustainability* para penyandang disabilitas. Para pemangku kebijakan diharapkan mampu

menciptakan iklim lapangan kerja yang ramah bagi kelompok disabilitas tanpa mengabaikan kualitas produksi sebagai seorang tenaga kerja. Artinya, keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak mempengaruhi kualitas kerja mereka. Hal inilah yang harus disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa dengan keterampilan yang mereka miliki, para penyandang disabilitas sekalipun mampu melakukan suatu pekerjaan.⁵⁰

D. *Siyasah Syar'iyah*

Dalam pembahasan mengenai *siyasah syar'iyah* ini, akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Diantara pembahasan tersebut yakni:

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis, menurut Ibnu 'Aqail yang dikutip oleh Chuzaimah *siyasah syar'iyah* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang secara kemasyarakatan mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.⁵¹

⁵⁰ Sy. Nurul Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur", *Nuansa*, Vol.15, Nomor. 2, (Juli-Desember, 2018), hal. 265-268.

⁵¹ Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal. 148.

Menurut Khallaf yang dikutip oleh Muhammad Iqbal *siyasah syar'iyah* dirumuskan dengan:

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع
المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة واصولها الكلية وان لم يتفق بأقوال
الأئمة المجتهدين

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan *Islam* yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarinya kemudaratannya dari masyarakat *Islam*, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan *syariat Islam* dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama *mujtahid*.”⁵²

Khallaf juga menjelaskan bahwa masalah umum umat *Islam* adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, seperti permasalahan di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Menurut Abdurrahman Taj yang dikutip oleh Muhammad Iqbal, *siyasah syar'iyah* adalah pengaturan yang tidak secara tegas terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) *syariat* yang dasarnya universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan.⁵³ Berdasarkan definisi para ahli diatas, maka disimpulkan bahwa hakikat dari *siyasah syar'iyah* sendiri yaitu:

⁵² Iqbal, *Fiqh Siyasah*....., hal. 5.

⁵³ *Ibid*.

- a. *Siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan umat.
- b. Pengurusan dan pengaturan inilah yang merupakan kewenangan para pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
- c. Tujuan adanya pengaturan yakni untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat *syariat Islam* yang universal.⁵⁴

2. Obyek *Siyasah Syar'iyah*

Secara terperinci Imam al Mawardi yang dikutip oleh Chuzaimah, menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam *Ahkamus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyasah syar'iyah* mencakup dua puluh bidang, yakni sebagai berikut:

- a. *'Aqdul Imamah* atau tata cara kepemimpinan dalam *Islam* yang mengacu kepada *syura*’;
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri;
- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*;
- d. *Taqlid al-imârat 'ala al-jihâd*;
- e. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*;
- f. *Wilayatu al-qadha*;
- g. *Wilayatu al-madhalim*;
- h. *Wilayatun niqabah*;

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 6.

- i. *Wilayah 'ala imamati ash-shalawat;*
 - j. *Wilayah 'ala al-hajj;*
 - k. *Wilayah 'ala al-shadaqat;*
 - l. *Wilayah 'ala al-fai wal ghanimah;*
 - m. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj;*
 - n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad;*
 - o. *Ihya'u al-mawat wa ikhraj al-miyah;*
 - p. *Wilayah Fil himâ wal arfâq;*
 - q. *Wilayah Fi ahkami al- iqtha';*
 - r. *Wilayah fi wadh'i dîwân;*
 - s. *Wilayah fi ahkami al- jarâim;* dan
 - t. *Wilayah fi ahkami al-hisbah.*⁵⁵
3. Peran Pemerintahan dalam *Siyasah Syar'iyah*

Dalam pandangan juris sunni, adanya khilafah atau pemerintahan adalah wajib hukumnya. Hal tersebut sebagai pengganti tugas kenabian yang berfungsi mengatur kehidupan dan urusan umat, baik dalam hal duniawi amupun keagamaan. Menurut Ibn Taimiyah, tugas dan tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk melaksanakan syariat Islam demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta amanah dalam masyarakat. Paradigma tersebut disandarkan dalam *al-Qur'am* dan *hadits*.⁵⁶

Menurut Hasan al-Banna yang dikutip oleh Muhammad Abdul, kewajiban pemerintahan Islam, yakni sebagai berikut:

⁵⁵ Chuzaimah, dkk., *Handbook Metodologi....*, hal. 150-151.

⁵⁶ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Ibn Taimiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal, 9-29.

- a. Menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang;
- b. Menyelenggarakan pendidikan;
- c. Memelihara kesehatan;
- d. Memelihara kepentingan umum;
- e. Mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda; serta
- f. Mengokohkan akhlaq.⁵⁷

Terdapat contoh bahwasanya kepala negara tidak kebal hukum dan hendaknya dekat dengan rakyatnya. Islam sendiri memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Kehormatan dan kemuliaan yang diperoleh hanya karena kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun demikian, kehormatan dan kemuliaan tersebut juga sebanding dengan besarnya tugas dan tanggungjawabnya.⁵⁸ Karena kedudukan yang sama inilah, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara juga dapat dikenai hukuman atas kejahatannya dan atas perbuatan yang melampaui batas kewenangannya.⁵⁹

Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala negara mempunyai beberapa kewajiban. Menurut al-Mawardi, kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

⁵⁷ Muhammad Abdul Qadir, *Fiqih Politik Islam*. (Jakarta: Amzah, 2005), hal. 40.

⁵⁸ Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukum fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Katib al-Arabi, t.tp.), hal. 134.

⁵⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Islam wa Audha una al-Siyasah*, (Kairo: Mukhtar al-Islam, 1978), hal. 215

- a. Memelihara agama sesuai dengan ajaran dasar dan sesuai dengan kesepakatan ulama salaf.
- b. Menjalankan hukum-hukum kepada orang-orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan di kalangan masyarakat, sehingga timbullah keadilan tanpa adanya penindasan.
- c. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga masyarakat merasa aman untuk bekerja sesuai profesi masing-masing.
- d. Menegakkan *hudud* (hukumn pidana), sehingga hukum Allah dapat berjalan dengan baik.
- e. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari serangan-serangan luar.
- f. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang betolak belakang dari dakwa Islam.
- g. Mengelola keuangan negara seperti pajak, sedekah, *ghanimah*, dan lain sebagainya.
- h. Menentukan anggaran belanja negara (APBN).
- i. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan keadilan, kejujuran, dan keterpercayaan mereka dalam memegang jabatan pemerintahan.
- j. Mengelola urusan kenegaraan secara umum, sehingga umat dapat hidup dalam kemakmuran dan agamapun dapat berjalan dengan baik.⁶⁰

Sedangkan menurut bernard Lewis, tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkenaan degan kemaslahatan raykat, yakni membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan musuh,

⁶⁰ Al Mawardi dan Abu Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Bashri al-Baghdadi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, (Mesir: Shahib, tt), hal. 15-16.

serta memberi kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk kehidupan yang lebih baik di dunia, guna mencapai kebahagiaan akhirat⁶¹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas banyak dijumpai, namun penulis menjadikan acuan hanya beberapa. Diantaranya yakni:

1. Peneliti DAUATUS SAIDAH, 2017, UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Skripsi tentang “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISABILITAS MELALUI KETERAMPILAN HANDICRAFT: TUNA RUNGU WICARA DI YAYASAN RUMAH REGIS TANJUNG BARAT JAKARTA SELATAN”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya agar penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kewajiban dalam bernegara adalah dengan cara diberdayakan. Salah satu bentuk pemberdayaan yaitu memberikan pelatihan keterampilan. Seperti yang dilakukan Yayasan Rumah Regis yang memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan keterampilan *handicraft*.⁶²
2. Peneliti OCA PAWALIN, 2017, UNIVERSITAS LAMPUNG. Skripsi tentang “PERAN DINAS SOSIAL KOTA METRO DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS”. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Dinas Sosial Kota Metro dalam

⁶¹ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam*, (Chichago: University of Chicago Press, 1988), hal. 70.

⁶² Saidah, *Pemberdayaan Masyarakat....*, hal. 6.

pemberdayaan penyandang disabilitas belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.⁶³

3. Peneliti CITRA GAFFARA TAQWARAHMAH, et. al., penelitian ini berjudul “PERAN KARANG TARUNA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA KARANGPATIHAN, KABUPATEN PONOROGO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peran dalam mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk membantu penyandang disabilitas mencapai kesejahteraan. Kegiatan pemberdayaan juga telah memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan penyandang disabilitas. Meski terdapat peningkatan pendapatan, kondisi ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas masih berada pada garis kemiskinan.⁶⁴
4. Peneliti AMIRAH MUKMININA, 2013, UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Skripsi tentang “PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN MENJAHIT DI YAYASAN WISMA CHESIRE

⁶³ Pawalin, *Peran Dinas Sosial Kota....*, hal. 2.

⁶⁴ Citra Gaffara Taqwarahmah, et. al., “Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, Nomor 1, (April, 2017), hal. 37.

JAKARTA SELATAN”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui keterampilan menjahit adalah salah satu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Yayasan Wisma Chesire untuk mengembangkan potensi penyandang disabilitas agar lebih berdaya. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan keterampilan menjahit di Yayasan Wisma Chesire.⁶⁵

5. Peneliti MOH. NASHIR HASAN, 2018, UIN WALISONGO SEMARANG. Skripsi tentang “PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DPC PPDI KOTA SEMARANG”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan oleh DPC PPDI Kota Semarang bertujuan untuk membuat penyandang disabilitas mempunyai daya agar mampu menjalani kehidupan secara lebih baik, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang menggunakan strategi (1) Motivasi (2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan (3) Manajemen diri (4) Mobilisasi sumber daya (5) Pembangunan dan pengembangan jejaring.⁶⁶

Dari kelima penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang mempunyai persamaan yaitu penelitian tersebut sama sama meneliti terkait

⁶⁵ Amirah Mukminina, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Mnejahit di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 4.

⁶⁶ Moh. Nashir Hasan, *Pemberdayaan Penyandang....*, hal. 9.

pentingnya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menjamin akses pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Ditinjau dari *siyasaḥ syar'iyah*.